

## EFEKTIVITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BATANG ARAU KOTA PADANG

Lisa Risna<sup>1)</sup>, Melinda Noer<sup>2)</sup> dan Rizki Aziz<sup>3)</sup>

Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang.

Program Studi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Universitas Andalas, Padang.

Email korespondensi : [lisarisna11@gmail.com](mailto:lisarisna11@gmail.com)<sup>1)</sup>, [melindanoer@yahoo.com](mailto:melindanoer@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [rizkiazizsyoeib@gmail.com](mailto:rizkiazizsyoeib@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Persoalan kumuh menjadi bagian permasalahan kumuh bagi kota-kota besar di Indonesia dan menjadi tanggung jawab semua pihak dalam penanganannya. Berbagai upaya dilakukan dalam penanganannya untuk terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, aman, tertib, layak huni, dan nyaman bagi penghuninya. Kelurahan Batang Arau Kota Padang salah satu kelurahan kumuh di Kota Padang sesuai SK Kumuh tahun 2014. Penanganan kumuh telah dilakukan oleh beberapa pihak sejak 4 tahun terakhir sehingga perlu dianalisis efektivitas penanganan permukiman kumuh yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara secara bebas. Data yang digunakan mencakup data kualitatif seperti data kondisi fisik wilayah, penggunaan lahan sedangkan data kuantitatif berupa data demografi, data sarana dan prasarana lingkungan, data numerik 7 aspek kumuh, dan data investasi kegiatan penanganan kumuh. Pengolahan data menggunakan analisis terhadap data baseline yang bersumber dari Program KOTAKU dan data kolaborasi kegiatan investasi penanganan kumuh tahun 2016-2019. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) salah satu program nasional yang fokus pada pencapaian pengurangan luasan kumuh. Hasil penelitian menginformasikan bahwa 3 kriteria yang dinilai efektivitasnya yaitu upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dinilai tidak efektif, hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, dinilai tidak efektif serta dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program dinilai efektif. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau dinilai tidak efektif.

*Kata kunci : Efektivitas, Kriteria Kumuh, Penanganan Kumuh*

### ABSTRACT

*The slum issue is part of the slum problems for big cities in Indonesia. It becomes the responsibility of all parties in handling it. Various efforts have been made to handle it in creating a healthy, clean, safe, orderly, livable and comfortable environment for its residents. Batang Arau, Padang City, is one of the sub-districts in Padang City that listed in the 2014 Slum Decree. Slum management has been carried out by several parties in the last 4 years, so it is necessary to analyze the its effectiveness. This research was conducted using qualitative and quantitative research methods. Data collection was carried out by field observations, and free interviews. The data used includes qualitative data such as data on the physical condition of the area, and land use while quantitative data is in the form of demographic, environmental facilities and infrastructure, numerical data on 7 aspects of slums, and investment data on slum handling activities. Data processing uses an analysis of baseline data sourced from the KOTAKU Program and collaboration data on slum handling investment activities in 2016-2019. The National Slum Upgrading*

*Program (KOTAKU) is a national program that focuses on reducing the slum area. The result of the study informed about 3 criteria that assessed for slum handling effectiveness. It was found that there are 2 aspects that considered to be ineffective, namely the efforts made by the government in implementing the program in accordance with the objectives and the results of implementing the program compared to the results previously determined. Another criterion which considered effective is the impact that is felt directly by the community from the implementation of the program. Based on this, it can be concluded that the effectiveness of handling slum settlement problems in Batang Arau Sub District is considered ineffective.*

*Keywords : Effectiveness, Slum Criteria, Slum Handli*

## **1. PENDAHULUAN**

Kelurahan Batang merupakan satu dari beberapa kelurahan kumuh yang ada di Kota Padang sesuai dengan SK Kumuh Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2014 dengan luasan kumuhnya seluas 16,71 hektar dan merupakan kelurahan yang memiliki luasan kumuh terbesar diantara 22 kelurahan kumuh lainnya yang tersebar di Kota Padang. Kelurahan Batang Arau memiliki potensi sebagai kawasan wisata sejarah yaitu Pelabuhan Muaro yang merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang. Kelurahan Batang Arau dikenal dengan makam dan jembatan Siti Nurbaya yang menjadi lokasi kunjungan wisata. Intervensi penanganan kumuh di Kelurahan Batang Arau telah dilakukan sejak Tahun 2017 sampai 2021. Beberapa program penanganan dilakukan dengan sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, bahkan pihak swasta dengan *Coorporate Social Responsibility (CSR)*. Namun seberapa efektifkah penanganan permukiman kumuh yang telah dilakukan di Kelurahan Batang Arau.

## **2. STUDI LITERATUR**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Permukiman kumuh ialah suatu kawasan dengan keadaan bangunan, area, prasarana serta fasilitas yang kurang baik serta tidak cocok dengan aturannya yaitu standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan fasilitas air bersih, sanitasi, ataupun ketentuan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta sarana sosial yang lain (Wilandari, 2017).

Permukiman kumuh sesuai dengan peraturan Kementerian PUPR No. 2/PRT/M/2016 tentang aspek dan kriteria kekumuhan terdiri dari 19 kriteria, yaitu :1) Kondisi bangunan terdiri dari bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan dan inkonsistensi dengan spesifikasi teknis bangunan, 2) Kondisi jalan lingkungan meliputi cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan, 3) Kondisi Penyediaan Air Minum, terdiri dari ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. 4) Kondisi pasokan air minum meliputi kesiapan akses aman terhadap air minum dan tidak memenuhi kebutuhan air minum. 5) Kondisi drainase lingkungan meliputi ketidakmampuan untuk mengalirkan limpasan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, drainase tidak terpelihara, dan kualitas konstruksi sistem drainase. 6) Kondisi pengelolaan air limbah, termasuk sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi standar teknis, serta infrastruktur dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. 7) Kondisi pengelolaan sampah, termasuk prasarana dan sarana sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai secara teknis serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah otomatis. 8) Kondisi proteksi kebakaran meliputi tidak tersedianya infrastruktur proteksi kebakaran dan tidak tersedianya fasilitas proteksi kebakaran.

Menurut Pasolong (2019), Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai karena proses kegiatan yang dilakukan. Secara umum, konsep efektivitas adalah status yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana direncanakan sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas program adalah upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya dan dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program dengan menggunakan kriteria tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau.

## 2.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kelurahan Batang Arau terletak di Kecamatan Padang Selatan, terdiri dari 19 RT yang tersebar di empat (4) RW pada Kelurahan Batang Arau, dengan ketinggian 5-10 m dpl dan luas wilayah 34 Ha. Jumlah penduduk Kelurahan Batang Arau pada Tahun 2020 adalah 4.896 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.188 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.242 kepala keluarga (KK). Permukiman kumuh Kelurahan Batang Arau berdasarkan SK Kumuh Kota Padang No. 163 Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Walikota Padang tersebar di Kawasan Prioritas menurut SK Walikota Padang No. 163 Tahun 2014 terletak di 16 RT yaitu di RW 01 (RT 02, 04), RW 02 (RT 01, 02, 03,04,05,06), RW 03 (RT 01, 02, 03, 04, 05), RW 04 (RT 01, 02, 03). Luas delineasi permukiman kumuhnya adalah 16,71 hektar. Jumlah penduduk di permukiman kumuh sebanyak 3.203 jiwa atau 853 kepala keluarga (pemukimian data baseline Program Kotaku, 2017) dengan jumlah bangunan sebanyak 801 unit.

- 1) Informasi tentang kondisi fisik wilayah, yang meliputi lokasi geografis, topografi dan kelerengan.
- 2) Informasi tentang pola penggunaan lahan, termasuk pola penggunaan lahan Kelurahan Batang Arau
- 3) Informasi karakteristik kawasan permukiman yang berkaitan dengan karakteristik fisik, yang meliputi informasi 7 indikator kumuh berupa kondisi bangunan, kondisi jalan, air lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi keselamatan kebakaran.
- 4) Demografi seperti jumlah penduduk, penduduk menurut jenis kelamin, penduduk menurut umur, mata pencaharian, dan karakter penduduknya.
- 5) Penduduk, jumlah keluarga dalam delineasi kawasan kumuh
- 6) Informasi jumlah ketersediaan sarana dan prasarana.
- 7) Data numerik yang berkaitan dengan 7 indikator kumuh berupa kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengamanan kebakaran.
- 8) Informasi kerjasama pendanaan dalam mengelola permukiman kumuh di kelurahan.

## 3. METODOLOGI

Berdasarkan tujuan studi yang ingin dicapai, maka secara umum studi ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu metode pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.

### 3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data berdasarkan jenis dan sumbernya yang dibutuhkan untuk penelitian. Berikut adalah penjabaran metode pengumpulan data yang digunakan dan dibutuhkan pada masing-masing sasaran yaitu:

### **a. Jenis Data**

Terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati, dan dapat secara deskriptif menggambarkan lokasi studi secara umum. Jenis data kualitatif yang dimaksud adalah :

- 1) Informasi tentang kondisi fisik wilayah, yang meliputi lokasi geografis, topografi dan kelerengan.
- 2) Informasi tentang pola penggunaan lahan, termasuk pola penggunaan lahan Kelurahan Batang Arau
- 3) Informasi karakteristik kawasan permukiman yang berkaitan dengan karakteristik fisik, yang meliputi informasi 7 indikator kumuh berupa kondisi bangunan, kondisi jalan, air lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi keselamatan kebakaran.

Data kuantitatif adalah data yang menggambarkan kondisi suatu fasilitas penelitian dengan tabulasi angka-angka yang dihitung untuk menemukan nilai yang diinginkan. Data kuantitatif yang dimaksud adalah:

- 1) Demografi seperti jumlah penduduk, penduduk menurut jenis kelamin, penduduk menurut umur, mata pencaharian, dan karakter penduduknya.
- 2) Penduduk, jumlah keluarga dalam deliniasi kawasan kumuh
- 3) Informasi jumlah ketersediaan sarana dan prasarana.
- 4) Data numerik yang berkaitan dengan 7 indikator kumuh berupa kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengamanan kebakaran.
- 5) Informasi kerja sama pendanaan dalam mengelola permukiman kumuh di kelurahan.

### **b. Sumber Data**

Dilihat dari sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber Primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan lapangan seperti kondisi eksisting lapangan dan informasi tentang permasalahan yang mencakup aspek kumuh yang ada. Sumber data yang memberikan informasi adalah PPK PKP Provinsi Sumatera Barat, koordinator BKM Siti Nurbaya dan perwakilan masyarakat (Tokoh Masyarakat) dan masyarakat penerima manfaat kegiatan yang berada di permukiman kumuh Kelurahan Batang Arau terutama mencakup kondisi eksisting 7 aspek kumuh yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.
- 2) Sumber sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari sumber yang ada yang dikumpulkan melalui rujukan perpustakaan dari instansi terkait. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:
  - a) Dokumen kebijakan ruang kota yang bersumber dari Dokumen RTRW Kota Padang tahun 2020-2030
  - b) Dokumen kebijakan kumuh kota RP2KPKP Kota Padang tahun 2015-2019
  - c) Kecamatan Padang Selatan Dalam Angka tahun 2021
  - d) Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Batang Arau tahun 2019
  - e) Data Baseline 7 Aspek Kumuh Kelurahan Batang Arau tahun 2015 sumber dari Program KOTAKU

- f) Data investasi kegiatan penanganan kumuh Kelurahan Batang Arau tahun 2016-2019 sumber dari SIM KOTAKU
- g) Foto-foto kondisi eksisting yang mencakup 7 aspek kumuh Kelurahan Batang Arau bersumber dari Program KOTAKU.

### 3.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian kuantitatif deskriptif (*mixed method*). Kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang disebut Metode Gabungan atau Metode Pencampuran Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2020:38), menyatakan bahwa setiap metode dapat digunakan untuk melengkapi metode lain jika penelitian dilakukan di tempat yang sama, tetapi dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Creswell (2009) dalam Sugiyono (2020: 38) mengidentifikasi metode gabungan sebagai metode penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Analisis terhadap efektivitas penanganan permukiman kumuh yang dilakukan menggunakan analisis basis data baseline permukiman kumuh yang diformulasikan dalam perhitungan pengurangan kumuh (Bangkim PUPR, 2016). Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Batang Arau mencakup 19 kriteria kumuh sesuai dengan Peraturan PUPR No. 2/PRT/M Tahun 2016. Berdasarkan data Baseline yang memuat 19 kriteria kumuh yang diformulasikan dalam perhitungan kumuh dapat diketahui tingkat kekumuhan awal di Kelurahan Batang Arau sebelum dilakukannya intervensi atau penanganan kumuh dengan setelah dilakukannya penanganan melalui kegiatan infrastruktur yang dibangun. Analisis terhadap intervensi kegiatan penanganan kumuh, apakah menggambarkan kondisi perubahan terhadap kriteria kumuh awal dengan kriteria kumuh setelah dilakukannya intervensi penanganan. Dari penilaian tersebut dapat dilihat seberapa besar efektivitas penanganan yang telah dilakukan. Penilaian efektivitas penanganan kumuh merujuk pada 3 kriteria penilaian menurut pendapat dari Kettner, Moroney dan Martin (2017), yaitu :

- 1) Upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dilihat dari investasi/biaya dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tolak ukur yang digunakan, adalah :
  - a) Jika tujuan tercapai melalui pelaksanaan program maka tergolong efektif
  - b) Jika tujuan tidak tercapai melalui pelaksanaan program maka tergolong tidak efektif
- 2) Hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya. Tolak ukur yang digunakan, adalah :
  - a) Jika terjadi perubahan terhadap tingkat kekumuhan maka tergolong efektif
  - b) Jika tidak terjadi perubahan terhadap tingkat kekumuhan maka tergolong tidak efektif
- 3) Dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program. Penilaian dampak yang dirasakan oleh masyarakat diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan 7 aspek kumuh. Tolak ukur yang digunakan, adalah :
  - a) Efektif jika dirasakan oleh masyarakat dampak dari kegiatan yang dilakukan
  - b) Tidak efektif jika tidak dirasakan oleh masyarakat dampak dari kegiatan yang dilakukan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tolak ukur yang digunakan, adalah :

- 1) Jika tujuan tercapai melalui pelaksanaan program maka tergolong efektif
- 2) Jika tujuan tidak tercapai melalui pelaksanaan program maka tergolong tidak efektif

Untuk melihat Efektivitas pada pencapaian tujuan melaksanakan kegiatan program, lihat Tabel 1.

**Tabel 1.** Intervensi Kegiatan dalam Pencapaian Tujuan Program  
(Kegiatan Tahun 2016 – 2019)

NO	Kriteria	Permasalahan/ Tujuan yang ingin dicapai	Bentuk Penanganan/Investasi Kegiatan (Th 2016 sampai 2019)	% Penyelesaian Masalah (% Kumuh Awal-% Kumuh Akhir)	Penilaian
1	Ketidakteraturan bangunan	599 unit	233 unit bangunan mendapatkan efek dari kegiatan pembangunan/rehap jalan	29,09 %	Tidak efektif
2	Kepadatan bangunan	< 250 unit/ha	Tidak ada intervensi kegiatan	0 %	Tidak dinilai
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	320 unit	Tidak ada intervensi kegiatan	0 %	Tidak efektif
4	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	1.603 meter	Pembangunan jalan sepanjang 799 m	10,19 %	Tidak efektif
5	Kualitas permukaan jalan lingkungan	3.044 meter	Perbaikan jalan lingkungan sepanjang 2.061 m	26,3 %	Tidak efektif
6	Ketersediaan akses aman air minum	386 KK	Pengadaan sambungan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) melayani sebanyak 30 KK	3,51 %	Tidak efektif
7	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	390 KK	Pengadaan sambungan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) melayani sebanyak 30 KK	3,52 %	Tidak efektif
8	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	0,15 ha	Tidak ada intervensi	0 %	Tidak efektif
9	Ketidakterediaan drainase	3712 meter	Pembangunan drainase sepanjang 655 m	9,05 %	Tidak efektif
10	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	990 meter	Pembangunan drainase yang menyebabkan penambahan layanan sepanjang 392 m	5,42 %	Tidak efektif
11	Tidak terpeliharanya drainase	3.490 meter	Merupakan efek dari pembangunan drainase terhadap drainase yang tidak terpelihara sepanjang 2.059 m	28,45 %	Tidak efektif
12	Kualitas konstruksi drainase	2.015 meter	Rehap drainase yang rusak, sepanjang 1.377 m	19,02 %	Tidak efektif
13	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	188 KK	Pembangunan MCK/jamban memberikan pengaruh pada 88 KK terhadap sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	10,43 %	Tidak efektif

NO	Kriteria	Permasalahan/ Tujuan yang ingin dicapai	Bentuk Penanganan/Investasi Kegiatan (Th 2016 sampai 2019)	% Penyelesaian Masalah (% Kumuh Awal-% Kumuh Akhir)	Penilaian
14	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	553 KK	Pembangunan MCK/jamban memberikan pengaruh terhadap 271 KK yang terlayani Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Sesuai dengan Persyaratan Teknis	35,80 %	Tidak efektif
15	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	93 KK	Pengadaan motor sampah dan bak sampah 3R berpengaruh terhadap 68 KK layanan	7,97 %	Tidak efektif
16	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	487 KK	Pengadaan motor sampah dan bak sampah 3R berpengaruh terhadap 478 KK layanan	56,03 %	Tidak efektif
17	Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	636 KK	Pengadaan motor sampah dan bak sampah 3R berpengaruh terhadap 547 KK layanan	64,13 %	Tidak efektif
18	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	51 unit	Efek dari pembangunan jalan sehingga bisa dilewati mobil damkar (terlayani 51 unit rumah)	6,37 %	Efektif
19	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0 unit	Tidak ada intervensi	0 %	Tidak dinilai

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Analisis terhadap intervensi kegiatan tahun 2016 sampai tahun 2019 dalam rangka pencapaian tujuan program, antara lain :

- a) Terdapat 1 kriteria kumuh yang bernilai efektif yaitu kriteria ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran yang memiliki permasalahan kumuh sebanyak 51 unit bangunan. Melalui kegiatan rehap/pembangunan jalan memberikan dampak terhadap ketersediaan prasarana proteksi kebakaran dengan layanan sebanyak 51 unit bangunan sehingga mampu menuntaskan permasalahan kumuh pada kriteria ini.
- b) Terdapat 16 kriteria kumuh yang bernilai tidak efektif karena pencapaian tujuan yang dilihat dari implementasi kegiatan penanganan tidak dapat menuntaskan permasalahan atau masih menyisakan permasalahan kumuh di masing-masing kriteria kumuh sehingga dinilai tidak efektif.
- c) Terdapat 2 kriteria kumuh yaitu kriteria kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan yang tidak memiliki permasalahan sehingga tidak dinilai efektivitasnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dinilai efektif sebesar 5,26 %, tidak efektif sebesar 84,21 % dan tidak dapat dinilai sebesar 10,53 %, dari keseluruhan kriteria kumuh. Penilaian efektivitas dari upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai disimpulkan tidak efektif.

b. Hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya.

Tolak ukur yang digunakan, adalah :

- 1) Jika terjadi perubahan terhadap nilai kekumuhan maka tergolong efektif
- 2) Jika tidak terjadi perubahan terhadap nilai kekumuhan maka tergolong tidak efektif

Untuk melihat Efektivitas pada hasil dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil sebelumnya, lihat Tabel 2.

**Tabel 2.** Intervensi Kegiatan Terhadap Penurunan Tingkat Kekumuhan

NO	Kriteria	Kondisi Awal Kekumuhan	Bentuk Penanganan/Investasi Kegiatan (Th 2016 - 2019)	Kondisi Akhir Kekumuhan	Penilaian
1	Ketidakteraturan Bangunan	Kumuh sedang	233 unit bangunan mendapatkan efek dari kegiatan pembangunan/rehap jalan	Kumuh Ringan	Efektif
2	Kepadatan Bangunan	Tidak kumuh	Tidak ada intervensi kegiatan	Tidak kumuh	Tidak efektif
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kumuh ringan	Tidak ada intervensi kegiatan	Kumuh Ringan	Tidak efektif
4	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Tidak kumuh	Pembangunan jalan sepanjang 799 m	Tidak kumuh	Tidak efektif
5	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Kumuh Ringan	Perbaikan jalan lingkungan sepanjang 2.061 m	Tidak kumuh	Efektif
6	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Kumuh ringan	Pengadaan sambungan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) melayani sebanyak 30 KK	Kumuh ringan	Tidak efektif
7	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kumuh ringan	Pengadaan sambungan perpipaan berupa sambungan rumah (SR) melayani sebanyak 30 KK	Kumuh ringan	Tidak efektif
8	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Tidak kumuh	Tidak ada intervensi	Tidak kumuh	Tidak efektif
9	Ketidakterediaan Drainase	Kumuh sedang	Pembangunan drainase sepanjang 655 m	Kumuh ringan	Efektif
10	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Tidak kumuh	Pembangunan drainase yang menyebabkan penambahan layanan sepanjang 392 m	Tidak kumuh	Tidak efektif
11	Tidak Terpeliharanya Drainase	Kumuh ringan	Merupakan efek dari pembangunan drainase terhadap drainase yang tidak terpelihara sepanjang 2.059 m	Tidak kumuh	Efektif
12	Kualitas Konstruksi Drainase	Kumuh ringan	Rehap drainase yang rusak, sepanjang 1.377 m	Kumuh ringan	Efektif
13	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Tidak kumuh	Pembangunan MCK/jamban memberikan pengaruh pada 88 KK terhadap sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Tidak kumuh	Tidak efektif
14	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kumuh sedang	Pembangunan MCK/jamban memberikan pengaruh terhadap 271 KK yang terlayani Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kumuh ringan	Efektif

NO	Kriteria	Kondisi Awal Kekumuhan	Bentuk Penanganan/Investasi Kegiatan (Th 2016 - 2019)	Kondisi Akhir Kekumuhan	Penilaian
15	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Tidak kumuh	Pengadaan motor sampah dan bak sampah 3R berpengaruh terhadap 68 KK layanan	Tidak kumuh	Tidak efektif
16	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Kumuh sedang	Pengadaan motor sampah dan bak sampah 3R berpengaruh terhadap 478 KK layanan	Tidak kumuh	Efektif
17	Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kumuh sedang	Pengadaan motor sampah dan bak sampah 3R berpengaruh terhadap 547 KK layanan	Tidak kumuh	Efektif
18	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak kumuh	Efek dari pembangunan jalan sehingga bisa dilewati mobil damkar (51 unit rumah)	Tidak kumuh	Tidak efektif
19	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak kumuh	Tidak ada intervensi kegiatan	Tidak kumuh	Tidak efektif

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Analisis intervensi kegiatan terhadap perubahan tingkat kekumuhan bertujuan untuk melihat perubahan tingkat kekumuhan yang terjadi setelah dilakukan intervensi kegiatan penanganan kumuh dengan sebelumnya. Berdasarkan intervensi kegiatan penanganan kumuh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan :

- a) Terdapat 8 kriteria kumuh yang bernilai efektif karena terjadi penurunan tingkat/nilai kekumuhan setelah dilakukan intervensi kegiatan penanganan kumuh.
- b) Terdapat 11 kriteria kumuh yang bernilai tidak efektif karena tidak terjadi penurunan tingkat/nilai kekumuhan atau tidak ada pengaruh setelah dilakukan intervensi kegiatan penanganan kumuh.

Berdasarkan hasil analisis intervensi kegiatan terhadap penurunan tingkat kekumuhan dinilai efektif sebesar 42,11 %, tidak efektif sebesar 57,89 %. Penilaian efektivitas dari hasil (*result*) pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya disimpulkan tidak efektif.

c. Dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program.

Tolak ukur yang digunakan, adalah :

- 1) Efektif jika dirasakan oleh masyarakat dampak dari kegiatan yang dilakukan
- 2) Tidak efektif jika tidak dirasakan oleh masyarakat dampak dari kegiatan yang dilakukan.

Untuk melihat Efektivitas pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan yang dilakukan, dinilai dari hasil wawancara dengan memilih sampel yang berperan sebagai nara sumber yang diambil secara random karena dinilai mengetahui atau memahami kondisi lingkungan mereka tinggal.

**Tabel 3.** Penilaian Dampak Kegiatan yang Dirasakan oleh Masyarakat

NO	Kriteria	Pernyataan Masyarakat (Key Person)	Penilaian
1	Ketidakteraturan Bangunan	- Rumah dibangun oleh saudara dengan jumlah penghuni 9 orang (Bapak Abdul Tamis)	Tidak efektif
2	Kepadatan Bangunan	- Jalan di depan rumah dalam kondisi bagus menjadi akses utama bagi warga yang tinggal di atas bukit dan rumah-rumah yang berada di lokasi jalan yang diperbaiki menjadi teratur	Tidak efektif
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	- Tinggal di rumah mertua sejak 25 tahun, jumlah penghuni 4 orang (Ibu Yuliar) - Rumah dibangun sendiri dengan jumlah penghuni 3 orang (Ibu Lena Rasyid) - Kondisi bangunan cukup baik dan adanya bantuan perbaikan rumah dari Partai PDI	Efektif
4	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	- Jalan lingkungan sudah dalam kondisi baik (Koordinator BKM Siti Nurbaya Bapak Oyon Darmawan)	Efektif
5	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	- Jalan yang dibangun sangat baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak sampai semua jalan karena keterbatasan biaya (Bapak Abdul Tamis) - Jalan lingkungan kondisi baik (Ibu Yuliar) - Jalan lingkungan dalam kondisi baik (Ibu Lena Rasyid)	Efektif
6	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	- Kebutuhan air minum terpenuhi, sumber air minum berasal dari mata air dari bukit dan PDAM (Pernyataan dari Koordinator BKM Siti Nurbaya, Bapak Oyon Darmawan) - Ketersediaan air minum bersumber dari mata air dari bukit, jika musim hujan air mencukupi tapi jika musim panas, kurang mencukupi ketersediaannya (pernyataan warga penerima manfaat Bapak Abdul Tamis)	Tidak efektif
7	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	- Meminta air dari tetangga menggunakan selang yang sumber airnya berasal dari bukit (Ibu Yuliar warga RW 2 RT 5) - Ketersediaan air dari bukit sangat tergantung pada musim jika musim hujan agak kering tapi jika musim hujan terpenuhi (ibu Dewi warga RW 2 RT 5)	Tidak efektif
8	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	- Ketersediaan drainase lingkungan mencukupi, tidak ada lagi banjir (Pernyataan dari Koordinator BKM Siti Nurbaya, Bapak Oyon Darmawan)	Efektif
9	Ketidaktersediaan Drainase	- Drainase yang ada alirannya cukup baik dan sejak dibangun (awalnya kondisi tanah) sudah tidak lagi berserakan (pernyataan dari warga penerima manfaat RW 2 RT 1 Bapak Abdul Tamis)	Efektif
10	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	- Saluran drainase cukup baik sejak dibangun tidak ada lagi banjir (Ibu Yuliar warga RW 2 RT 5)	Efektif
11	Tidak Terpeliharanya Drainase		Efektif
12	Kualitas Konstruksi Drainase		Efektif
13	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	- Sudah terlayani pengelolaan air limbah (Pernyataan dari Koordinator BKM Siti Nurbaya, Bapak Oyon Darmawan)	Efektif
14	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	- Punya MCK sendiri - Menggunakan MCK umum (Ibu Yuliar warga RW 2 RT 5)	Efektif
15	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	- Belum semua terlayani pengelolaan sampah oleh pemda tingkat kota (Koordinator BKM Siti Nurbaya) - Sampah dibakar di halaman rumah (Ibu Yuliar warga RT 5 RW 2)	Tidak efektif

NO	Kriteria	Pernyataan Masyarakat (Key Person)	Penilaian
16	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	- Sampah dikelola oleh pihak kelurahan iuran swadaya masyarakat sebesar Rp. 150.000 per bulan tapi sebagian ada yang dibakar (pernyataan dari tokoh masyarakat, Ibu Lena Rasyid)	Tidak efektif
17	Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Tidak efektif
18	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	- Tidak terdapat APAR di rumah - Beberapa ruas jalan lingkungan tidak bisa dilewati untuk truk pemadam kebakaran.	Tidak efektif
19	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Tidak efektif

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Analisis terhadap dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau selama tahun 2016 sampai 2019 dilihat dari aspek kumuh, antara lain:

- a) Terdapat 10 kriteria kumuh bernilai efektif karena kegiatan penanganan kumuh yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- b) Terdapat 9 kriteria kumuh bernilai tidak efektif karena kegiatan penanganan kumuh yang dilakukan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena belum memenuhi kebutuhan masyarakat (masih kurang layanannya).

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dampak kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat yang dinilai berdasarkan 7 aspek kumuh dengan nilai efektif sebesar 52,63 % dan tidak efektif sebesar 47,37 %. Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap penilaian dampak kegiatan dirasakan oleh masyarakat dinilai efektif.

## 5. KESIMPULAN

- a. Penilaian penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, berdasarkan intervensi investasi kegiatan infrastruktur yang dibangun telah menyelesaikan permasalahan kumuh sebesar 54,01%, namun belum dikatakan berhasil meskipun memberikan dampak terhadap pengurangan permasalahan kumuh dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui infrastruktur yang dibangun.
- b. Pihak yang berperan dalam kegiatan pengelolaan penyelesaian kumuh di Kelurahan Batang Arau adalah pemerintah melalui sumber pembiayaan kegiatan APBN Pusat, Dirjen PKP, DAK, Program Kotaku, APBD II Kota Padang, swadaya masyarakat melalui sumbangan makanan dan kegiatan gotong royong dan kelompok peduli dari Partai PDI Perjuangan. Kegiatan penanganan permasalahan kumuh di Kelurahan Batang Arau telah menyerap biaya berupa pembangunan infrastruktur dengan rincian sumber dana pemerintah sebesar 96,31%, masyarakat sebesar 0,30% dan kelompok peduli perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 3,38%. Kontribusi sumber pembiayaan terbesar penanganan kumuh berasal dari pemerintah.
- c. Penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau, efektivitasnya dinilai berdasarkan 3 kriteria yaitu upaya/usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dinilai tidak efektif, hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, dinilai tidak efektif dan dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program dinilai efektif. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau dinilai tidak efektif.

## **REFERENSI**

- Anindita, W. (2017). Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi. [Tugas Akhir]. Surabaya. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 314 hal.
- Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Batang Arau. (2021).
- Kettner, P.M., R.M. Moroney., and L.L Martin. (2017). *Designing and Managing Programs an Effectiveness-Based Approach*. Sage Publications. 341 p.
- Keputusan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Alfabeta. Bandung: 296 hal.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfa Beta. Bandung. 274 hal.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.